

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)*, (Jakarta: Permata Aksara, 2014)
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020)
- Freddy Hidayat, *Mengenal Hukum Perusahaan*, (Banyumas: CV Pena Persada, 2020)
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014)
- Herlien Budiono, *Demikian Akta Ini (Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di dalam Praktik)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018)
- Lili Rasjidi dan LB. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Nyulistiowati Suryanti, *Hukum Perusahaan*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015)
- Pujiyono, *Hukum Perusahaan*, (Surakarta: CV Indotama Solo, 2014)

- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta, 2020)
- Rudhi Prasetya, *Teori & Praktik Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Salim HS, *et.al.* (A), *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- _____. (B), *Buku Kedua: Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)
- Soerjono Soekanto, *et.al.*, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019)
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2010)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999)
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktik Notaris*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011)

B. Jurnal

- Henry Donald Lbn Toruan, “Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.435-458>

- Ida Ayu Karina Diantari, “Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Kabupaten Badung”, *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, 2018. DOI: 10.24843/AC.2018.v03.i03.p07
- Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 11, 2020. DOI: <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>
- Jonathan Adi Biran Munandir, *et.al.*, “Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8, 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.26905/idjch.v8i1.1731>
- Pande Gde Satria Wibawa *et.al.*, “Keautentikan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Secara Elektronik Dalam Perspektif Cyber Notary”, *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 06, 2021. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i03.p13>
- Sri Wahyuni, “Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Pernyataan Terkait Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Dan Pertanggungjawaban Pidananya (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 9/PID/2019/PT.BTN)”, *Otentik’s: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, 2021. DOI: 10.35814/otentik.v3i2.2418
- Syahrullah, *et.al.*, “Sejarah Perkembangan Perseroan Terbatas di Indonesia”, *Fundamental: Jurnal Publikasi Hukum*, Vol. 9, 2020. DOI: <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.14>

Yanuar Agung Sudjateruna, *et.al.*, “Pengaturan Organ Komisaris Dalam Perseroan Terbatas Perseorangan Menurut Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja”, *Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 06, 2021. DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i03.p2

Zulkarnain Ridwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, 2012. DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.56>

C. Hasil Penelitian

Christian Kharis Wicaksono, “Kekuatan Hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Yang Dibuat Di Hadapan Notaris”, Tesis, Jakarta: Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta, 2020

Dina Septiarrestu, “Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Yang *Non Profit* Oriented Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan”. Tesis, Depok: Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

Ida Nadirah, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Pelaksanaan Perdamaian Kepailitan”. Disertasi, Medan: Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018

Ilham Hidayat Azis, “Politik Hukum Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019”. Tesis, Makassar: Program Studi Magister Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2022

Jes Simalungun Putra Purba, “Tanggung Jawab Hukum Induk Perusahaan Sebagai Penjamin (*Corporate Guarantor*) Atas Utang Anak Perusahaan Dalam Kepailitan”. Skripsi, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, 2014

Roita Asma, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Di Jakarta Timur”, Tesis, Semarang: Program Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2008

Shinta Pangesti, “Penerbitan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dari Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum”, Tesis, Jakarta: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2017

Tan Swandy, “Analisis Yuridis Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas”, Tesis, Jakarta: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2016

Yugo Mofie, “Pelanggaran Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan

Rapat (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta Nomor: 04/PTS/MPW.JKT/V/2009)”, Tesis, Jakarta: Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta, 2019

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana

diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data

Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611)

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1492)

Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29 - 30 Mei 2015

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor Putusan Nomor
74/PDT/2021/PT.BTN

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor Putusan Nomor
785/Pdt.G/2020/PN.Tng

G. Kamus

Henry Campbell Black, M.A., Black's Law Dictionary, (St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1968)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kamus Versi Online/daring (dalam jaringan)".

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>